

**PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA SEKOLAH (RAPBS) DI SD NEGERI 014 TUNAS JAYA  
KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Heriyanto**

[heriyanto4817@gmail.com](mailto:heriyanto4817@gmail.com)

SDN 014 Tunas Jaya Kecamatan Tempuling – Indragiri Hilir

**Kodrat Sunyoto**

**Sri Mulyani**

Universitas Wijaya Putra Surabaya

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the procedures and constraints that occur in the preparation of the school income and expenditure budget plan (RAPBS) at SD Negeri 014 Karya Tunas Jaya, Tempuling District, Indragiri Hilir Regency. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The process of preparing the RAPBS at SD Negeri 014 Tempuling District includes; identification of activities or needs to be implemented during the budget period; identification of sources of funds; Formulate a budget in a format that has been approved and used by SD Negeri 014 Tempuling District, Propose a draft that has been prepared by the principal and teachers to the school committee; revise the proposed budget; The school is assisted by the School Committee in conducting socialization to all parents and guardians of students; and finally make sufficient revisions and endorsements. Sources of education budget at SD Negeri 014 Tempuling District are funds from the government and BOS funds.*

*Keywords: preparation of RAPBS, budget, revenue*

**ABSTRAK**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan kendala-kendala yang terjadi dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) di SD Negeri 014 Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Proses penyusunan RAPBS di SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling meliputi; indentifikasi kegiatan atau kebutuhan yang akan dilaksanakan selama periode anggaran; indentifikasi sumber-sumber dana; Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh pihak SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling, Mengusulkan draf yang telah disusun oleh kepala sekolah bersama guru kepada pihak komite sekolah; melakukan revisi terhadap usulan anggaran; Sekolah dibantu oleh Komite Sekolah melakukan sosialisasi kepada semua orang tua wali murid; dan terakhir melakukan revisi secukupnya dan pengesahan. Sumber anggaran pendidikan pada SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling adalah dana dari pemerintah dan dana BOS.

Kata kunci : penyusunan RAPBS, anggaran, pendapatan

## PENDAHULUAN

Pembahasan tentang Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) didasarkan pada asumsi bahwa sistem penganggaran di sekolah menggunakan pendekatan yang disebut sistem penganggaran berbasis sekolah atau *School-based Budgeting System*. Dengan sistem ini alokasi anggaran sekolah bersifat lump-sum atau kita kenal juga dengan sistem hibah blok (*block grant*). Sistem ini memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menggali, mengalokasikan dan mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan baik untuk operasional sehari-hari maupun untuk pengembangan sebagaimana direncanakan dalam Rencana strategi (Renstra) maupun Renop (Rencana Operasional).

Persoalan yang paling sering dihadapi sekolah dalam penerapan PPBS adalah kebutuhan waktu yang cukup panjang. Selain itu, penekanan hubungan antara alokasi anggaran dengan tujuan yang dapat dirumuskan dengan jelas serta penentuan tujuan-tujuan pendidikan terbukti bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan bahkan sering mendatangkan keputus-asaan. Persoalan lainnya terkait dengan sulitnya dicapai kesepakatan di antara pihak yang terlibat mengenai data dan proses yang harus dilalui dalam proses pelaksanaannya dan juga keterbatasan kemampuan pimpinan sekolah terkait dengan teknik-teknik pengambilan keputusan yang beorientasi sistem tersebut. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa PPBS tetap memiliki keunggulan dibandingkan dengan pendekatan tradisonal. Di era yang dilingkupi keterbatasan sumber dana dan tuntutan akuntabilitas yang terus meningkat saat ini, tidak ada pilihan lain bagi sekolah kecuali menerpkan sistem penganggaran yang sistematis seperti ditawarkan dalam PPBS tersebut.

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang prosedur penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPB) di SD Negeri 014 Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) di SD Negeri 014 Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. selain itu juga untuk mengetahui kendala-kendala prosedur penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) di SD Negeri 014 Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

## TINJAUAN TEORETIS

Untuk melakukan kegiatan tersebut ada sebuah system pengaturan yang sering disebut prosedur. Prosedur adalah pekerjaan yang meliputi suatu sub fungsi daripada suatu fungsi tertentu. Kemudian prosedur juga dapat diartikan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perlakuan yang seragam dan terjadi secara berulang-ulang (Cole dalam Baridwan, 2003).

Mulyadi (2008:5) menerangkan bahwa pengertian prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal (tuliskan, menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam yang terjadi berulang-ulang.

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-aumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai hasil yang diinginkan (Terry, 2011). Terry (2011) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu kumpulan keputusan untuk mempersiapkan tindakan-tindakan dimasa mendatang.

### **Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah**

Pendapatan dan belanja sekolah merupakan dua komponen pokok dalam RAPBS. Pendapatan sekolah adalah segala penerimaan yang diperoleh sekolah yang berupa uang atau setara uang (buku, peralatan, bahan-bahan, dan lain-lain) dalam satu tahun anggaran. Sedangkan belanja sekolah adalah segala pengeluaran yang dilakukan sekolah dalam bentuk uang atau setara uang dalam satu tahun anggaran.

Menurut Suryana (2008) anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan sekolah. Maka seorang penanggungjawab program kegiatan di sekolah harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. Masih menurut Suryana (2008), ada dua bagian pokok anggaran yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBS, yaitu rencana sumber atau target penerimaan/pendapatan dalam satu tahun yang dan rencana penggunaan keuangan dalam satu tahun yang bersangkutan, semua penggunaan keuangan sekolah dalam satu tahun anggaran perlu direncanakan dengan baik agar kehidupan sekolah dapat berjalan dengan baik pula.

### **Langkah-langkah Penyusunan RAPBS**

Dalam penyusunan RAPBS adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan

dan pengeluaran harus berimbang dan diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Adapun langkah-langkah penyusunan RAPBS menurut Suryana (2008) adalah sebagai berikut: (a) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan. (b) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya (c) Menentukan program kerja dan rincian program (d) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program (e) Menghitung dana yang dibutuhkan (e) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.

Rencana tersebut setelah dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka selanjutnya ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota.

### **Realisasi APBS**

Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Ini dapat terjadi karena beberapa sebab:

- 1). Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran.
- 2). Terjadinya penghematan atau pemborosan.
- 3). Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan.
- 4). Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi.
- 5). Penyusunan anggaran yang kurang tepat (Suryana, 2008).

### **Sumber Pendapatan**

Setiap sekolah memiliki sumber-sumber pendanaan yang berbeda-beda. Untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) sumber pendapatan utama berasal dari pemerintah dan siswa. Sedangkan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh

masyarakat sumber pendapatan biasanya berasal dari yayasan penyelenggaranya, siswa, dan pemerintah. Pendapatan dari masing-masing sumber tersebut biasanya masih dirinci lagi menjadi beberapa jenis anggaran. Beberapa contoh jenis anggaran dari masing-masing sumber pendapatan sekolah antara lain adalah dari pemerintah (APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota), dari orang tua/wali murid/komite sekolah (SPP/sumbangan pelaksanaan pendidikan, BPP/bantuan pengembangan pendidikan, Biaya Pendaftaran Murid Baru, Biaya Ujian Akhir Semester, Biaya Ujian Akhir Sekolah, Iuran Ekstra Kurikuler, Iuran Perpustakaan, Bantuan-bantuan lain yang ditentukan sekolah), dari yayasan penyelenggara (Biaya Operasional Sekolah, Biaya Pengembangan Sekolah), Donatur (Bantuan sukarela masyarakat umum insidental, Bantuan sukarela masyarakat umum rutin, Bantuan alumni), dari hasil usaha sekolah (Kantin Sekolah, Koperasi Sekolah, Unit Usaha sekolah, Penyewaan gedung dan fasilitas milik sekolah), dari lain-lain (Bunga tabungan sekolah, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sekolah masing-masing).

### **Alokasi Belanja Sekolah**

Menurut Pasal 62 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan biaya pendidikan di sekolah meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi sekolah meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik

untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dari tiga macam biaya tersebut, dua diantaranya harus dicantumkan dalam setiap RAPBS yang disusun sekolah.

#### **1) Biaya Investasi Sekolah**

Anggaran investasi dapat juga diartikan sebagai alokasi anggaran yang dibutuhkan sekolah untuk meningkatkan pelaksanaan misinya melalui perbaikan atau peningkatan kinerjanya. Anggaran ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kapasitas (kemampuan) sumber daya yang dimiliki sekolah dalam mendukung peningkatan atau perbaikan kegiatan pendidikan. Berikut ini beberapa contoh mata anggaran yang termasuk dalam anggaran pengembangan sekolah.

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru dan staf sekolah: pelatihan, MGMP, PKG, magang, seminar;
- Peningkatan sarana dan prasarana sekolah: pengadaan sarana atau prasarana baru, peningkatan kapasitas sarana-prasarana yang telah ada, renovasi fasilitas fisik untuk merubah atau meningkatkan fungsi atau kapasitasnya;
- Pengadaan bahan-bahan referensi untuk siswa maupun guru.
- Pengembangan sistem atau perangkat lunak sekolah: pengembangan KTSP, pengembangan kebijakan, aturan, atau sistem baru dalam rangka peningkatan kinerja sekolah, pengembangan model-model pembelajaran yang baru melalui PTK atau PTS, dan lain-lain.
- Biaya operasional manajemen dan bahan habis pakai untuk

mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan di atas.

## 2) Biaya Operasi atau Biaya Rutin

Biaya operasi adalah alokasi biaya yang dibutuhkan sekolah agar dapat mempertahankan atau meningkatkan sedikit-demi sedikit pelaksanaan misi utamanya melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari. Dalam Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2005 biaya operasi didefinisikan sebagai bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Anggaran operasional ini dapat mencakup: (a) Gaji guru dan pegawai tetap (b) Honorarium guru/pegawai tidak tetap atau tenaga pendukung lainnya (c) Biaya operasional, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan sarana-prasarana sekolah sehingga dapat berfungsi secara normal (d) Biaya pengadaan bahan habis pakai pendukung kegiatan sekolah yang bersifat rutin (e) Biaya tagihan berlangganan: listrik, air, telepon, sambungan internet (f) Biaya operasional pimpinan dan staf sekolah.

## Perhitungan Pendapatan dan Belanja Sekolah

Frekuensi penerimaan selama satu tahun dari masing-masing sumber pendapatan berbeda-beda, sekali dalam satu tahun, rutin setiap bulan, setiap semester, bahkan ada yang tidak dapat dipastikan. Sekolah umumnya tidak banyak kesulitan untuk menghitung perkiraan pendapatan yang bersifat rutin, akan sering mengalami kesulitan dalam memperkirakan pendapatan yang bersifat insidental atau tidak menentu.

Perhitungan biaya sekolah harus didasarkan pada rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Operasional Sekolah (Renop). Namun demikian prinsip fisibilitas implementasi program dan efisiensi penggunaan anggaran harus juga dipertimbangkan pada saat melakukan perhitungan belanja sekolah untuk dituangkan dalam RAPBS. Dalam bahasa yang sederhana, anggaran biaya yang dialokasikan untuk setiap kegiatan yang diusulkan harus cukup namun sama sekali tidak dibenarkan terjadi pemborosan. Ketepatan dan kecermatan perhitungan anggaran dalam RAPBS menjadi pra-syarat terwujudnya prinsip-prinsip itu. Beberapa langkah berikut dapat membantu sekolah untuk mendapatkan hasil perhitungan yang tepat itu.

- ✓ Volume pekerjaan yang akan dilaksanakan harus telah terdefinisikan dengan jelas. Untuk melaksanakan pelatihan guru, misalnya, harus sudah dipastikan berapa orang yang akan mengikuti pelatihan, berapa lama, dan dimana pelatihan yang akan dilaksanakan. Dari data ini akan mudah diperhitungkan biaya pelatihan yang harus dibayar ke tempat pelatihan, biaya perjalanan, biaya hidup, dan biaya pendukung lainnya.
- ✓ Spesifikasi dan kualifikasi barang atau jasa yang akan diadakan harus jelas dan rinci.
- ✓ Sekolah harus memiliki informasi yang dapat dipercaya mengenai biaya satuan (*unit cost*) untuk setiap barang atau jasa yang akan diadakan. Pemanfaatan berbagai media informasi dan komunikasi akan sangat membantu mendapatkan informasi ini.
- ✓ Biaya-biaya tambahan seperti pajak, kenaikan harga karena inflasi, biaya pengiriman, biaya pemasangan, dan lain-lain harus diperhitungkan dengan cermat. Hal ini penting karena harga yang ditawarkan oleh penyedia barang

atau jasa biasanya belum termasuk biaya-biaya ini.

- ✓ Untuk memudahkan proses pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan anggaran pemerintah, sekolah harus memahami dengan baik peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa. Dengan pemahaman ini sekolah akan dapat mencegah terhambatnya implementasi kegiatan yang telah diprogramkan yang diakibatkan oleh prosedur pengadaan barang/jasa itu.
- ✓ Masing-masing sumber pendapatan biasanya telah ditetapkan untuk mendanai kegiatan atau pengadaan barang/jasa tertentu. Penyusun RAPBS harus memahami dengan baik ketentuan-ketentuan tentang komponen-komponen anggaran yang diperbolehkan untuk masing-masing sumber pendapatan itu.
- ✓ Penyusun RAPBS harus memahami dengan baik ketentuan pembiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan masalah yang dirumuskan dan dijadikan acuan dalam penentuan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus utama adalah: prosedur penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) di SD Negeri 014 Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

Tempat penelitian dimaksud adalah SDN 014 Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah komite sekolah SDN 014 Karya Tunas Jaya Kecamatan

Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dan beberapa *stakeholder* lainnya di lokasi penelitian.

Dalam mengumpulkan data penelitian, terdapat 3 (tiga) proses kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu proses memasuki lokasi penelitian, ketika berada di lokasi penelitian dan mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan *interview guide*.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan terjadi secara bersamaan setelah masa pengumpulan data yaitu: 1) Reduksi data, yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan tinalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 2) Penyajian data, yaitu berupa sekumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 3) Menarik kesimpulan verifikasi, dilakukan secara longgar, tetap terbuka, tetapi dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan kokoh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sumberdaya yang dimiliki oleh SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling meliputi guru, pegawai administrasi, siswa, inventarisasi dan ruangan, serta data bangunan fisik. Sumberdaya manusia untuk kategori guru dan kepala sekolah, SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling memiliki 44 orang guru termasuk satu kepala sekolah. Sumberdaya ini terdiri dari 24 orang berstatus PNS, satu orang berstatus Guru Tidak Tetap Pusat, satu orang berstatus Guru Tidak Tetap Daerah, dan 23 orang berstatus Guru Tidak Tetap Komite.

Keseluruhan proses kegiatan yang terjadi di sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan harus mengacu kepada berbagai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) oleh sekolah maka perlu diperhatikan ketentuan dan langkah-langkah dalam penyusunan RAPBS sebagai berikut: (1) Melakukan analisis konteks (konteks 8 SNP, kondisi satuan pendidikan, dan kondisi lingkungan satuan pendidikan) (2) Menelaah hasil analisis konteks untuk mendapatkan kesenjangan yang dihadapi sekolah (3) Mendata hasil kesenjangan dan menetapkan skala prioritas penanganan program sekolah (4) Merumuskan/menyusun visi sekolah (5) Merumuskan/menyusun misi sekolah (6) Merumuskan/menyusun tujuan sekolah (7) Merumuskan/menyusun hasil dan sasaran yang akan dicapai (8) Merumuskan/menyusun strategi pelaksanaan

Proses penyusunan RAPBS ada beberapa hal yang perlu dilakukan sekolah, alur penyusunan RAPBS menurut Muhaimin (2011: 202) sebagai berikut:

#### 1. Persiapan

Sebelum perumusan RAPBS dilakukan, kepala sekolah dan guru bersama komite sekolah membentuk tim perumus RAPBS yang disebut Tim Penyusun Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (TPRAPBS/M). Setelah TPRAPBS/M terbentuk, tim ini melakukan kegiatan mengikuti orientasi mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan, wawasan pengembangan pendidikan, dan perumusan RAPBS /M.

#### 2. Perumusan RAPBS

Perumusan RKS dilakukan melalui empat tahap, yaitu:

- a. Mengidentifikasi tantangan sekolah.
- b. Analisis pemecahan tantangan dan rencana strategis.
- c. Penyusunan program sekolah.
- d. Penyusunan rencana biaya dan pendanaan.

#### 3. Pengesahan RAPBS

Setelah RAPBS/M selesai disusun oleh TPRAPBS/M, RAPBS/M dibahas bersama oleh kepala sekolah, semua waka sekolah, semua guru, perwakilan TU, siswa, yayasan (jika ada) dan komite sekolah untuk dikaji ulang agar RAPBS yang telah disusun menjadi milik bersama dan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya RAPBS yang telah dikaji ulang dan diperbaiki disahkan oleh kepala sekolah/madrasah komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota. Akhirnya RAPBS/M yang telah disahkan disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di sekolah.

Disusunnya RAPBS diharapkan dapat tercipta pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya untuk tercapainya tujuan di sekolah. Adanya RAPBS tidak hanya tujuan yang tercapai namun bagaimana pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya yang ada. RAPBS memuat beberapa komponen yaitu sumber dana, jumlah biaya satuan, jumlah biaya total, uraian kegiatan, program sekolah dan lainnya.

Dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah di SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling pertama dalam merencanakan anggaran yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan menentukan prioritas, kemudian menjabarkan kedalam perencanaan anggaran sehingga dapat memudahkan pihak sekolah dalam menentukan prioritas pengeluaran anggaran baik itu

anggaran bersumber dari pemerintah, orang tua peserta didik, maupun masyarakat baik dalam bentuk barang maupun uang semuanya kami buat dalam rencana anggaran pendapatan belanja sekolah setelah itu kami membuat perencanaan sesuai dengan skala prioritas.

Setiap kegiatan yang melalui perencanaan anggaran pendidikan dalam hal ini, pihak sekolah menyusun rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dimana dapat mencerminkan kekuatan sekolah dalam membiayai pendidikan dan sekaligus dapat menggambarkan rata-rata status sosial ekonomi keluarga dari peserta didik setelah itu pihak sekolah akan memprioritaskan anggaran sekolah sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan sekolah kami punya anggaran kemandirian yang langsung dari yayasan itu yang dikelola berdasarkan pedoman yang ada diukonis.

Namun temuan dalam penelitian pengelolaan anggaran pendidikan belum sepenuhnya mengacu pada pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan. Sering terjadi pengeluaran anggaran sekolah kurang melalui perencanaan yang matang sehingga pemakaian keuangan sekolah kurang mencapai sasaran yang diharapkan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling dalam upaya transparansi pengelolaan sekolah adalah sebagai berikut: menginventaris kegiatan yang akan dilaksanakan, menyusun rencana berdasarkan skala prioritas, menentukan program yang dilaksanakan, menentukan kebutuhan, menentukan sumber dana pembiayaan program.

Persoalaan anggaran yang ada di sekolah SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling dalam implementasinya, atau realisasi anggaran seringkali tidak sama dengan rencana, bisa lebih besar maupun lebih kecil, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran namun kami

dari pihak sekolah saya selaku bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan atau program sekolah dalam menggunakan anggaran yang ada maka setiap perencanaan kegiatan itu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sepanjang selisih anggaran masih dalam batas toleransi, maka selisih itu dianggap wajar, jika selisih tersebut melebihi batas toleransi maka harus dilakukan investigasi penyebab terjadinya selisih anggaran dan itu sudah menjadi komitmen Komite Sekolah dalam melaksanakan program sekolah.

Berdasarkan penelitian diketahui partisipasi komite dalam kebijakan pembiayaan pendidikan adalah pengawasan dan evaluasi. Komite Sekolah dapat terlibat aktif dalam setiap rapat yang diadakan oleh sekolah dalam mendiskusikan kegiatan yang harus dilaksanakan sekolah. Komite dapat memberikan masukan atau bahan-bahan pertimbangan kepada Sekolah, serta Komite Sekolah dapat memberikan penyelesaian masalah ketika ada kegiatan yang tidak tertuang dalam RAPBS.

Dalam pelaksanaan dana pendidikan, mestinya ada proses pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi. Hal ini didasarkan pada salah satu fungsi komite sekolah adalah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismanto (2014) bahwa pada pengawasan di sekolah, Komite bersama-sama dengan masyarakat untuk memantau pencapaian kinerja anggaran sekolah. Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, baik dari pihak pemerintah, Komite sekolah dan juga dari masyarakat. Hasil pelaksanaan penggunaan dana tersebut selanjutnya dikaji dan dievaluasi untuk mengetahui kualitas pengembangan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur

keseriusan sekolah dalam menggunakan dana anggaran pendidikan. Partisipasi pengawasan oleh komite terhadap pelaksanaan dana pendidikan terbatas, karena pengawasan penuh penggunaan dana pendidikan berada pada wewenang dinas pendidikan dan Kepala Sekolah.

Komite Sekolah dapat mengadakan evaluasi pelaksanaan anggaran melalui laporan yang dibuat oleh pihak sekolah sebelum ikut menanda tangani laporan tersebut. Jika memang sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan, maka laporan itu disahkan oleh ketua komite sekolah dan selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada wali murid dalam pertemuan per semester saat penerimaan raport. Dalam pertemuan itulah para wali murid bisa menanyakan berbagai hal berkenaan dengan laporan yang dibuat oleh sekolah.

Bentuk evaluasi dari masyarakat dan wali murid bisa disampaikan secara lisan saat pertemuan maupun secara tertulis. Dalam rapat pihak sekolah menyediakan kertas untuk memberikan kesempatan pada peserta rapat yang ingin menyampaikan segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan. Lewat cara ini pihak sekolah akan tahu apa sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat dan wali murid, sebagai bahan acuan untuk perbaikan di masa mendatang.

Bentuk partisipasi komite sekolah dalam dalam kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi ada 4, yaitu 1) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan; 2) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pendukung; 3) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pengontrol; dan 4) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Mediator. Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Ismanto (2014) yang menunjukkan bahwa dalam Manajemen Berbasis Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran sekolah. Partisipasi ini

dilakukan dengan memberikan pertimbangan, kontrol, advokasi dan pengawasan dari perencanaan, pelaksanaan dan anggaran sekolah.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan RAPBS di SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling**

Dalam pelaksanaan kegiatan setiap program yang dilaksanakan oleh sekolah terlebih dahulu membuat rencana kegiatan. Disini pihak sekolah SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling membuat suatu tim pelaksanaan program yang dapat bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan, dengan demikian setiap kegiatan ada pertanggung jawaban sehingga penggunaan dana sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam hubungan sekolah dan masyarakat, fenomena kurangnya jalinan kerjasama sekolah dengan komite sekolah (masyarakat) dalam proses penyelenggaraan pendidikan bisa saja terjadi. Padahal, seharusnya antara pihak sekolah, komite sekolah dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pendidikan itu harus berjalan bersama-sama dan seimbang. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, fenomena ini akan menjadi suatu sebab terjadinya ketimpangan dalam proses penyelenggaraan pendidikan, adanya ketidakproporsionalan dalam proses dan penentuan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, dan adanya ketidakmaksimalan atas peran dan fungsi komite sekolah sebagai representasi masyarakat luas.

### **SIMPULAN**

Sumber pembiayaan dalam pengembangan pendidikan di SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah. Pengalokasian anggaran tersebut disusun dalam sebuah rencana anggaran, yaitu Rencana

Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Sekolah (RAPBS). Penyusunan anggaran dilakukan untuk merealisasikan rencana serta sebagai proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi setiap program dan aktifitas dalam bentuk satuan uang. RAPBS dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan program sekolah selama satu tahun mendatang. Setiap awal tahun pelajaran SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling selalu menyusun RAPBS.

Proses penyusunan RAPBS di SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling meliputi; indentifikasi kegiatan atau kebutuhan yang akan dilaksanakan selama periode anggaran; indentifikasi sumber-sumber dana; Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh pihak SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling, Mengusulkan draf yang telah disusun oleh kepala sekolah bersama guru kepada pihak komite sekolah; melakukan revisi terhadap usulan anggaran; Sekolah dibantu oleh Komite Sekolah melakukan sosialisasi kepada semua orang tua wali murid; dan terakhir melakukan revisi secukupnya dan pengesahan. Sumber anggaran pendidikan pada SD Negeri 014 Kecamatan Tempuling adalah dana dari pemerintah dan dana BOS.

Partisipasi komite dalam kebijakan pembiayaan pendidikan adalah pengawasan dan evaluasi. Komite Sekolah dapat terlibat aktif dalam setiap rapat yang diadakan oleh sekolah dalam mendiskusikan kegiatan yang harus dilaksanakan sekolah. Komite dapat memberikan masukan atau bahan-bahan pertimbangan kepada Sekolah, serta Komite Sekolah dapat memberikan penyelesaian masalah ketika ada kegiatan yang tidak tertuang dalam RAPBS.

Bentuk partisipasi komite sekolah dalam dalam kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi ada 4, yaitu 1) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan 2) Partisipasi

Komite Sekolah sebagai Pendukung; 3) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pengontrol dan 4) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Mediator.

Dalam hubungan sekolah dan masyarakat, fenomena kurangnya jalinan kerjasama sekolah dengan komite sekolah (masyarakat) dalam proses penyelenggaraan pendidikan bisa saja terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arismunandar. 2007. *Rencana Strategis Sekolah*. Ditjen PMPTK, Depdiknas di Jakarta.
- Brodjonegoro, S.S. 2003. *Higher Education Long Term Strategy 2003-2010*. Direktorat General of Higher Education, Ministry of National Education Republic of Indonesia.
- Canavan, N. & Monahan, L. 2000. *School Culture and Ethos: Releasing the Potential*. A resource pack to enable schools to access articulate and apply ethos values. Dublin: Marino Institute of Education.
- Directorat General of Higher Education. 2003. *Technological and Professional Skills Development Sector Project (TPSDP) Batch III: Guidelines for Sub-Project Proposal Submission*. Direktorat General of Higher Education, Ministry of National Education. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2006. *Panduan Penyusunan Proposal Program Hibah Kompetisi*. Ditjen Dikti, Depdikas. Jakarta.
- Furlong, C. & Monahan L. 2000. *School Culture and Ethos*. Dublin: Marino Institute of Education
- Hope A., Timmel S. 1999. *Training for Transformation*. London: The Intermediate Technology Group.
- Kavanagh, A. 1993. *Secondary Education in Ireland: Aspects of Changing Paradigm*. Tullow: Patrician Brothers Generalate.
- Lerner, A.L. 1999. *A Strategic Planning Primer for Higher Education*. Northridge. California: College of

Business Administration and Economics, California State University.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.

- Lyddon, J. W. 1999. *Strategic Planning in Smaller Nonprofit Organizations: A Practical Guide for the Process*. Michigan: W.K. Kellogg Foundation Youth Initiative Partnerships
- Nickols, K. and Thirunamachandran, R. 2000. *Strategic Planning in Higher Education: A Guide for Heads of Institutions, Senior Managers and Members of Governing Bodies*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2005. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- Prayogo, Joko. 2007. *Rencana Strategik*. Makalah disajikan pada Pendidikan dan Pelatihan Kemitaraan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditjen PMPTK, Depdiknas di Jakarta, Juli 2007.
- School Development Planning Initiative. 1999. *School Development Planning: Draft Guidelines for Second Level Schools*. Dublin: SDPI,
- Tuohy, D. 1997. *School Leadership and Strategic Planning*. Dublin: A.S.T.I
- Umaedi. 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Pengelolaan Sekolah Untuk Peningkatan Mutu*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah, Depdiknas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta: